

## Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan BumDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

<sup>1</sup> Nurul Azizah, <sup>2</sup> Margi Astatanu Kusnoto, <sup>3</sup> Nurul Nurafifah, <sup>4</sup> Deasyanti Aryani Dhewi, <sup>5</sup> Rimi Gusliana Mais

<sup>1,2,3,4,5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

<sup>1</sup>nurullazzh@gmail.com, <sup>2</sup>m.astatanu@gmail.com, <sup>3</sup>afifahnurul419@gmail.com, <sup>4</sup>dsynt110@gmail.com,

<sup>5</sup>rimi\_gusliana@stei.ac.id

### ABSTRACT

*Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) are very important for local economic development, empowering communities through managing local resources and public services. This research aims to analyze the application of Entity Accounting Standards Without Public Accountability (SAK ETAP) at BUMDes Ayu Bagia located in Baha Village, Mengwi District, Badung Regency. It also examines the factors that influence the success or failure of BUMDes and offers concrete recommendations for strengthening government support and relevant policies for BUMDes in Indonesia. This research uses a descriptive approach by relying on secondary data in the form of the financial report of BUMDes Ayu Bagia for 2022-2023. The findings show that BUMDes Ayu Bagia's financial reports do not fully comply with SAK ETAP. The problems included missing income entries in the statement of changes in equity and failure to present investment and financing cash flows. The main factors for non-compliance are the limited knowledge and awareness of BUMDes management regarding SAK ETAP and the lack of socialization by local governments regarding correct financial reporting.*

*Keywords: SAK ETAP, BUMDesa, Financial Reports*

### ABSTRAK

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat penting bagi pembangunan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal dan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada BUMDes Ayu Bagia yang terletak di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Ia juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan BUMDes dan menawarkan rekomendasi konkret untuk memperkuat dukungan pemerintah dan kebijakan yang relevan bagi BUMDes di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengandalkan data sekunder berupa laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia tahun 2022-2023. Temuan menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP. Masalahnya mencakup hilangnya entri pendapatan dalam laporan perubahan ekuitas dan kegagalan menyajikan arus kas investasi dan pembiayaan. Faktor utama ketidakpatuhan adalah terbatasnya pengetahuan dan kesadaran manajemen BUMDes mengenai SAK ETAP dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah tentang pelaporan keuangan yang benar.

Kata Kunci: SAK ETAP, BUMDes, Laporan Keuangan

Submitted: 23 Desember 2024

Revised: 26 Desember 2024

Accepted: 03 Januari 2025

Email korespondensi : nurullazzh@gmail.com

## PENDAHULUAN

Mengingat pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Di banyak negara, beberapa pendekatan seperti BUMD bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal dan layanan publik seperti *Council-Owned Companies* di Inggris dan *Public Corporations* di Jepang. Di Indonesia, terdapat 1.133 BUMD yang tersebar di 546 pemerintah daerah dengan 1.084 BUMDes yang masih aktif sebagai turunan dari lembaga BUMD. Pengelolaan laporan keuangan beberapa negara pada pendekatan tersebut menggunakan standar internasional IFRS for SMEs, yang kemudian diimplementasikan secara nasional yaitu SAK ETAP, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BUMDes.

Pengelolaan BUMDes berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat desa secara langsung sebagai lembaga usaha yang mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan sebagai sarana pendorong kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian oleh Poeh & Peilouw, (2022) SAK ETAP sangat sesuai diterapkan pada karakteristik BUMDes. Kemudian menurut Rodriguez-galindo (2024), mengadopsi kerangka kerja akuntansi yang sesuai dan akan memfasilitasi implementasi yang lebih relevan dan berkelanjutan, sehingga menguntungkan entitas. Oleh karena itu, pengimplementasian SAK ETAP secara akurat pada laporan keuangan BUMDes di Indonesia sangatlah penting karena dapat mencerminkan peluang sekaligus tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai standar. Namun banyak BUMDes masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar ini akibat keterbatasan pengetahuan akuntansi. Di daerah terpencil, hambatan lain seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan akses pasar, sumber daya manusia yang kurang terampil, dan akses teknologi yang terbatas semakin memperumit proses pelaporan keuangan. Selain itu, minimnya pendampingan dan supervisi dari pemerintah daerah menyebabkan penyusunan laporan keuangan tidak memiliki fungsi manfaat yang maksimal dikarenakan penyajian dan penyampaian informasi yang tidak andal dan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

Meski demikian, beberapa BUMDes telah mulai menerapkan standar ini secara parsial, menunjukkan potensi untuk pengelolaan yang lebih baik dengan adanya pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian oleh Ginanjar (2020) sistem

informasi, pemahaman standar akuntansi, dan peran pemerintah sangat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan BUMDes. Maka untuk dapat menghasilkan laporan keuangan BUMDes yang berkualitas, perhatian harus difokuskan pada ketiga variabel tersebut. Dengan hasil penelitian oleh Sirait et al., (2021) menyarankan bahwa diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk pengurus ataupun mempekerjakan masyarakat setempat yang memahami praktek akuntansi sehingga BUMDes dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan tentunya dapat semakin berkembang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes. Penelitian yang dilakukan oleh Arafah Arifin et al., (2022) pada BUMDes di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menunjukkan bahwa implementasi laporan keuangan BUMDes tidak berdasarkan aturan SAK ETAP. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, menurut Helmawanti et al., (2023) pada BUMDes Batu Batuah Desa Batu Tojah Kecamatan Barito Tuhup Raya menunjukkan bahwa implementasi SAK ETAP belum sesuai dengan pedoman SAK ETAP karena tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan dan penyajian pos tidak berdasarkan pedoman SAK ETAP.

Pada penelitian di BUMDes Batu Batuah Desa Batu Tojah Kecamatan Barito Tuhup Raya, penyebab BUMDes belum menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangannya karena kurangnya diseminasi pemerintah mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP berdasarkan penelitian Helmawanti et al., (2023). Sedangkan hasil penelitian pada BUMDes di Desa Tuban, penyebab BUMDes belum mengimplementasikan SAK ETAP karena adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga laporan keuangan belum dapat dibuat dengan baik dan kurangnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada BUMDes menurut penelitian Supeno, (2023). Selain itu, juga Ayuningbudi et al., (2024) menekankan bahwa BUMDes Sempu Mandiri belum mencatat CaLK dalam laporan pertanggungjawaban, karena bendahara BUMDes belum mengetahui standar yang tepat untuk laporan keuangan BUMDes, oleh karena itu laporan keuangan BUMDes Sempu Mandiri disajikan dengan gaya yang sederhana.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu, banyak yang mengungkapkan bahwa penyusunan laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP dan penyebab belum

sepenuhnya mengikuti SAK ETAP sangat beragam. Oleh karena itu, pentingnya pada penelitian ini adalah upaya untuk mengeksplorasi strategi peningkatan daya saing BUMDes melalui pemanfaatan teknologi dan pelatihan akuntansi berbasis SAK yang lebih efektif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, serta menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan BUMDes, serta memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat dukungan pemerintah dan kebijakan yang relevan bagi sektor BUMDes di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan wawasan yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan daya saing bagi BUMD untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang SAK ETAP dan mendukung pemahaman tentang SAK EP, serta diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional secara lebih inklusif dan *sustainability*.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Motivasi

Mengingat pesatnya perkembangan perekonomian di Indonesia, peranan akuntansi sangatlah penting sebagai Teori motivasi dikemukakan oleh Bedard dan Chi (1993) dalam penelitian Helmawanti et al., (2023) yang menegaskan bahwa adanya motivasi untuk belajar lebih tentang ilmu akuntansi akan meningkatkan pemahaman manajer atau pemilik usaha dalam menerapkan standar akuntansi pada perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam mengelola usaha akan semakin baik, jika pengetahuan akuntansi yang dimiliki oleh pemilik usaha tersebut juga baik dan luas. Penelitian ini menggunakan teori motivasi tersebut karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes.

## **Teori Entitas**

Teori entitas dikemukakan oleh Paton (1962) dalam penelitian oleh Arafah Arifin et al., (2022) menyatakan bahwa perusahaan adalah entitas bisnis independen dari pemilik. Paton menekankan teori ini pada gagasan pengelolaan dan tanggung jawab. Menurut teori ini, bisnis peduli dengan keberlangsungan usaha dan informasi keuangan pemilik ekuitas untuk memenuhi persyaratan hukum, mempertahankan hubungan baik dengan pemegang ekuitas, dan berharap dapat memperoleh dana di masa depan. Ada perbedaan antara kepentingan pribadi pemilik dan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, setiap transaksi yang dicatat dan dipertanggungjawabkan harus melibatkan perusahaan.

## **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah organisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan merupakan bagian dari usaha milik negara. Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan modalnya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah disebut perusahaan daerah. Tujuan mendirikan perusahaan daerah adalah untuk berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan desa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Contoh perusahaan daerah termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). PDAM dan BPD memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi. Adanya BUMD juga akan meningkatkan kesejahteraan desa-desa di wilayah tersebut.

Pembangunan desa sejalan dengan pembangunan daerah; keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menangkal kemiskinan di beberapa desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan lembaga ini.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat mendirikan BUMDes adalah inisiatif yang dibuat oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa,

sumber daya alam desa, dan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Menurut Lewaherilla et al., (2022), jika BUMDes dikelola dengan baik, mereka akan membuat desa lebih mandiri dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat. Mereka juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sumber daya manusia. Pernyataan tersebut dilengkapi oleh Munawir et al., (2022), tujuan utama pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
2. Mengoptimalkan aset desa untuk mensejahterakan desa.
3. Memperkuat upaya masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar untuk menunjang kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan pekerjaan.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

## **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Ikatan Sejak 19 Mei 2009, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). SAK ETAP mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Entitas yang memiliki tanggung jawab publik yang signifikan dan perusahaan yang melakukan bisnis internasional dapat menggunakan SAK yang berbasis IFRS. Namun, mayoritas perusahaan kecil dan menengah di Indonesia kurang memahami dan menerapkan SAK umum. (Sirait et al., 2021)

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk pengguna eksternal, dimaksudkan untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pengguna eksternal termasuk kreditur, pemilik, dan lembaga pemeringkat kredit yang tidak terlibat langsung dalam operasi bisnis.

Entitas tanpa akuntabilitas publik merujuk pada organisasi atau bisnis yang operasinya tidak menarik perhatian atau pengawasan yang signifikan dari masyarakat umum. Biasanya, entitas ini tidak diwajibkan untuk menyediakan laporan keuangan yang secara luas tersedia untuk umum. Berikut beberapa contoh entitas tanpa akuntabilitas publik:

- a. Perusahaan Keluarga: Bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh keluarga, di mana saham dan kepentingan bisnis tidak diperdagangkan untuk publik.
- b. Praktik Profesional Pribadi: Misal kantor akuntan, dokter, atau pengacara yang beroperasi secara independen dan tidak memiliki saham atau surat utang yang diperdagangkan di bursa saham.
- c. Entitas yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Publik
- d. Koperasi dan Asosiasi: Organisasi yang melayani kepentingan anggotanya, dan tidak memiliki akuntabilitas finansial yang luas kepada publik.
- e. Perusahaan Swasta Besar: Perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di pasar saham publik atau *non go public*.

Entitas tanpa akuntabilitas publik biasanya memiliki kewajiban pelaporan keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan publik, karena lingkup operasi dan dampak kegiatan mereka terbatas pada pemangku kepentingan internal dan tidak mempengaruhi publik secara luas.

Tujuan SAK ETAP adalah untuk meningkatkan fleksibilitas penerapannya dan memudahkan akses ETAP ke pendanaan dari perbankan. SAK ETAP adalah SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum yang berbasis IFRS; sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; dan raltif stabil selama beberapa tahun. (Wahyudi et al., 2023).

Namun, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) telah disahkan pada 30 Juni 2021 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). SAK EP merupakan adopsi dari IFRS *for SMEs* dengan mempertimbangkan keadaan di Indonesia. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) akan digantikan oleh SAK EP pada tahun 2025. Tujuan SAK EP adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat yang

tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) kepada pengguna eksternal. Organisasi publik yang bertanggung jawab dapat menerapkan SAK EP jika telah diizinkan oleh undang-undang yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.

## Laporan Keuangan Sesuai SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP laporan keuangan disusun seperti:

### 1) Laporan Posisi Keuangan

Bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara dapat menggunakan SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum). SAK umum tersebut cenderung lebih sulit untuk dipahami serta diterapkan bagi mayoritas entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

### 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi mencatat segala pendapatan serta pengeluaran sepanjang suatu periode, kecuali jika SAK ETAP mengarahkan hal lain. Akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi meliputi: pendapatan bersih, hpp, beban operasional dan lain-lain, bagian pendapatan atau kerugian dari investasi yang diterapkan melalui metode ekuitas, pengeluaran pajak serta pendapatan atau kerugian bersih. Perusahaan dilarang menggolongkan atau menyajikan pos-pos pendapatan dan pengeluaran sebagai “pos yang tidak biasa”, baik dalam laporan pendapatan atau kerugian maupun dalam rekaman tambahan laporan keuangan.

### 3) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menggambarkan perjalanan jumlah modal yang dimiliki perusahaan dari awal sampai akhir periode, serta sebab-sebab berubahnya modal, Kasmir (2019) dalam penelitian Helmawanti et al., (2023). Berdasarkan IAI entitas menyajikan laporan perubahan modal yang menunjukkan:



1. Modal Awal
2. Laba atau rugi bersih
3. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
4. Jumlah investasi dan dividen, serta distribusi tambahan ke pemilik ekuitas.

#### **4) Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi terkait perubahan historis atas kas dan setara kas suatu perusahaan yang dihasilkan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (Ilmiah & Pendidikan, 2024).

#### **5) Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, catatan atas laporan keuangan merupakan dokumen yang berisi informasi tambahan selain dari yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tentang hal-hal yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan serta penjelasan atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan (Harefa & Serniati, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan keadaan dari sebuah objek penelitian terkait bagaimana sebuah masalah terjadi dan akan dianalisis. Data kualitatif deskriptif merupakan data berupa angka-angka dari laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan dan laba rugi, dan rasio-rasio keuangan, dikemukakan oleh Tampubolon (2023). Keadaan yang akan dianalisis adalah mengenai implementasi SAK ETAP pada BUMDes dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung untuk menganalisis tentang kesesuaian pencatatan laporan keuangan dengan SAK ETAP. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh pada BUMDes Ayu Bagia. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung periode 2022-2023, yaitu laporan

posisi keuangan, laporan laba rugi konsolidasi, dan laporan perubahan modal serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Metode analisis yang pertama pada penelitian ini adalah mencari data yang dibutuhkan untuk studi kasus BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Penulis mencari data sekunder dari berbagai sumber media, kemudian merangkum dan memilih hal-hal yang berfokus pada tema dan penelitian ini.
2. Menganalisa penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia. Penulis melihat bagaimana pencatatan laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia, menganalisis kelengkapan dan penempatan pos-pos akun pada laporan keuangan, melihat pencatatan laporan keuangan dan membandingkannya dengan SAK ETAP.
3. Menganalisa perubahan laporan keuangan atas penerapan SAK ETAP.
4. Menarik kesimpulan setelah menganalisis bagaimana penyusunan laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia dibandingkan dengan ketentuan SAK ETAP.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BUMDes Ayu Bagia merupakan Badan Usaha Milik Desa Baha yang berlokasi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. BUMDes Ayu Bagia didirikan pada 25 Februari 2018 melalui Perdes Desa Baha No. 21 Tahun 2021. Pendirian BUMDes Ayu Bagia bertujuan untuk untuk memanfaatkan potensi dan aset Desa Baha sehingga diharapkan dapat memberikan sumber pendapatan asli desa disertai dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan warga Desa Baha. Pada tahun 2023 BUMDes Ayu Bagia memiliki 3 unit usaha yang terdiri dari Perdagangan, Kontruksi, dan Pertamina Desa. Modal awal BUMDes Ayu Bagia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp 510.000.000.

## Hasil Penelitian

### a. Laporan Posisi Keuangan

**Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan BUMDes Ayu Bagia**

<b>Laporan Posisi Keuangan</b>			
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<b>Aset Lancar</b>		Kewajiban Lancar	Rp21.724.986
Kas	Rp198.555.924	Utang	
Bank	Rp8.423.832	Penadapatan Diterima Dimuka	
Piutang	Rp294.036.476	<b>Total Kewajiban</b>	<b>Rp21.724.986</b>
Persediaan Lancar	Rp107.703.164		
Persediaan Tetap	Rp135.703.164		
Bank		<b>Ekuitas</b>	
Biaya Dibayar Dimuka		Ekuitas	-Rp371.601.893
		Modal	
<b>Aset Tidak Lancar</b>		Modal Disetor	Rp3.262.671.237
<b>Aset Tetap</b>		Saldo Laba	
Pembangunan Gudang	Rp97.517.000	Pembagian Laba Akhir Tahun 2022	-Rp19.549.412
PT Kontruksi	Rp26.500.000	Saldo Laba Tahun Berjalan	Rp105.078.912
Bangunan	Rp690.241.350	<b>Total Ekuitas</b>	<b>Rp2.976.598.843</b>
Tanah Desa Adat	Rp285.750.000		
Pembangunan Pertamina Desa	Rp1.120.321.300		
Kendaraan	Rp116.700.000		
Peralatan Kantor	Rp103.239.000		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-Rp114.885.024		
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-Rp36.148.028		
Akumulasi Penyusutan Peralatan	-Rp366.400.000		
<b>Total Aset</b>	<b>Rp2.998.323.829</b>	<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>Rp2.998.323.829</b>

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Ayu Bagia Tahun 2023

Berdasarkan penelitian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Ayu Bagia telah menyajikan laporan posisi keuangan berupa aktiva, kewajiban dan ekuitas. Realisasi total aset BUMDes Ayu Bagia pada akhir periode 2023 mencapai Rp2.998.323.829. Secara komposisi, aset BUMDes Ayu Bagia terdiri dari aset lancar sebesar 24,83% dan aset tidak lancar sebesar 64,52%. Adapun total kewajiban lancar BUMDes Ayu Bagia sebesar Rp21.724.986 dan total ekuitasnya sebesar Rp2.976.598.843 pada akhir periode 2023.

#### b. Laporan Laba Rugi

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi BUMDes Ayu Bagia**

Laporan Laba Rugi	
Pendapatan Usaha Grosir	Rp2.902.091.744
Pendapatan Pertades	Rp225.470.849
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp3.127.562.593</b>
Harga Pokok Penjualan	Rp2.652.157.994
HPP Grosir	Rp173.432.869
<b>Total HPP</b>	<b>Rp2.825.590.863</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>Rp301.971.730</b>
Biaya Gaji	Rp173.285.000
Biaya Administrasi dan Umum	Rp89.147.325
Biaya Penyusutan	Rp46.550.559
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp308.982.884</b>
Pendapatan Lainnya	Rp126.891.127
Biaya Lainnya	Rp290.603
<b>Laba/Rugi</b>	<b>Rp119.589.370</b>
Pajak	Rp14.510.370
<b>Laba</b>	<b>Rp105.079.000</b>

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Ayu Bagia Tahun 2023

Berdasarkan penelitian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Ayu Bagia telah menyajikan laporan laba rugi berupa pendapatan, biaya-biaya, laba (rugi) sebelum pajak, beban pajak dan laba (rugi) bersih. Pada periode akhir 2023 BUMDes memperoleh laba bersih sebesar Rp105.079.000 dengan pendapatan sebesar Rp3.127.562.593. Pendapatan BUMDes Ayu Bagia pada periode 2023 mengalami kenaikan

dari Rp2.486.974.229 pada periode sebelumnya. Sehingga kenaikan pendapatan BUMDes periode 2022-2023 mencapai Rp640.588.364 dengan persentase 20,48%. Pendapatan BUMDes didapatkan dari penjualan barang dan jasa unit usaha perdagangan dan pertamina desa, disertai dengan bunga bank. Sedangkan beban BUMDes terdiri dari beban gaji, administrasi dan umum sebesar Rp262.432.325.

### c. Laporan Perubahan Modal

**Tabel 3. Laporan Perubahan Modal BUMDes Ayu Bagia**

Laporan Perubahan Modal	
Modal Awal	Rp2.891.069.344
Saldo Laba Ditahan per 31 Desember 2023	Rp105.078.912
Total Kewajiban	Rp21.724.986
Dividen Untuk Tahun Terakhir	Rp19.549.412
Modal Awal Tahun 2024	Rp2.998.323.830

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Ayu Bagia Tahun 2023

Berdasarkan penelitian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Ayu Bagia telah menyajikan laporan perubahan modal yang terdiri dari modal awal, saldo laba, dividen dan modal untuk periode selanjutnya. Modal awal BUMDes Ayu Bagia pada tahun 2023 sebesar Rp2.891.069.344. BUMDes Ayu Bagia tidak memperoleh dana tambahan selain dari APB Desa pada tahun 2023.

### d. Laporan Arus Kas

**Tabel 4. Laporan Arus Kas BUMDes Ayu Bagia**

Laporan Arus Kas	
Arus Kas Aktivitas Operasi	
Penerimaan Kas Penjualan	Rp3.127.562.593
Pendapatan Lain-lain	Rp126.891.127
Arus Kas Keluar	
Pembelian Barang	Rp2.825.590.863

Laporan Arus Kas	
Pembayaran Beban Gaji	Rp173.285.000
Administrasi dan Umum	Rp89.147.325
Bunga Bank dan Admin	Rp290.603
Pembagian Laba Tahun 2022	Rp19.549.412
Penerimaan - Pengeluaran	Rp146.590.517
Saldo Kas 1 Januari 2023	Rp51.965.407
Saldo Kas Per 31 Desember 2023	Rp19.855.924

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban BUMDes Ayu Bagia Tahun 2023

Berdasarkan penelitian pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes Ayu Bagia telah menyajikan Laporan Arus Kas dengan memperoleh kas bersih pada akhir periode 2023 sebesar Rp19.855.924. Saldo Kas BUMDes Ayu Bagia pada periode 2023 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya sebesar Rp51.965.407 menjadi Rp198.555.924, sehingga kenaikan saldo kas BUMDes periode 2022-2023 mencapai Rp146.590.517 dengan persentase 35,36%.

## e. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 1. Gambaran Umum

#### a. Pendirian

Pendirian BUMDes adalah alat untuk memanfaatkan ekonomi lokal dengan berbagai potensi yang ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha. BUMDes juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa sehingga desa dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Desa Baha mendirikan BUMDes bernama BUMDes Ayu Bagia pada 25 Februari 2018 untuk memanfaatkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan warga. Pembangunan dilakukan oleh kekuatan warga, bukan hanya dari program pemerintah. Pentingnya menggali potensi sumber daya alam dan manusia menjadi dasar dalam pengelolaan BUMDes Ayu Bagia Baha.

b. Perijinan

Adapun Dasar Hukum pendirian BUMDes Ayu Bagia Baha adalah Perdes Baha Nomor 21 tahun 2021 tentang perubahan Perdes Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu BUMDes Ayu Bagia Baha sudah terdaftar sebagai badan hukum pada tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor AHU-02050.AH.01.33.Tahun 2021.

2. Kebijakan Akuntansi

a. Dasar Penyusunan

Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP.

b. Kas Dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas di BUMDes pada periode ini sebesar Rp. 198,555,924 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 146,590,517, dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp. 51,965,407. Kas di Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebanyak Rp. 8,423,832.

c. Aset Tetap

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh BUMDes sebesar Rp. 1,934,579,650 yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 185,673,051.

d. Pendapatan Dan Beban

Pendapatan yang diterima BUMDes berasal dari penjualan barang dan jasa serta bunga yang didapatkan dari tabungan di Bank pada tahun 2023 sebesar Rp. 3,254,453,720. Pembelian barang dagangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2,825,590,863. Sedangkan beban diperoleh dari beban gaji, administrasi dan umum yaitu sebesar Rp 262,432,325.

e. Laba Usaha

Labanya pada tahun 2023 sebesar Rp. 105,078,912. Labanya ini akan dibagi Pendapatan Asli Desa sebesar 35%, Desa Adat 15%, Penasehat sebesar 10%, Pengawas sebesar 5%, Pelaksana Operasional 10%, pendidikan dan sosial sebanyak 5%, pemupukan modal sebanyak 15% dan cadangan sebesar 5%.

## Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

**Tabel 5. Analisis Laporan Keuangan BUMDes Berdasarkan SAK ETAP**

Laporan Keuangan BUMDes Ayu Bagia	SAK ETAP	Analisis Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan	Berdasarkan SAK ETAP, Laporan Posisi Keuangan meliputi aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas.	BUMDes Ayu Bagia sudah menyajikan Laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK ETAP karena telah menyajikan laporan posisi keuangan berupa aset lancar, aset tetap, kewajiban, dan ekuitas.
Laporan Laba Rugi	Berdasarkan SAK ETAP, Laporan Laba Rugi meliputi Pendapatan, beban, laba bruto, beban pajak, dan laba neto.	BUMDes Ayu Bagia sudah menyajikan Laporan laba rugi sesuai dengan SAK ETAP karena telah menyajikan laporan laba rugi berupa pendapatan, beban, laba bruto, beban pajak, dan laba neto
Laporan Arus Kas	Berdasarkan SAK ETAP, Laporan Arus Kas meliputi Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.	BUMDes Ayu Bagia belum menyajikan Laporan Arus Kas yang sesuai dengan SAK ETAP, karena hanya menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas keluar dan saldo kas pada akhir periode.
Laporan Perubahan Modal	Berdasarkan SAK ETAP, Laporan Perubahan Modal meliputi Laba/rugi entitas pada satu periode, pos pendapatan, dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas dan dividen.	BUMDes Ayu Bagia belum menyajikan Laporan perubahan modal yang sesuai dengan SAK ETAP, karena hanya menyajikan modal awal, kewajiban, dan deviden.
Catatan atas Laporan Keuangan	Berdasarkan SAK ETAP, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan serta informasi penjas atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.	BUMDes Ayu Bagia belum sepenuhnya menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan SAK ETAP, karena tidak menyajikan informasi tentang persediaan, hutang, ekuitas, dan pajak.

Sumber: Penulis



## Pembahasan

Hasil penelitian yang didapat bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Ayu Bagia belum sepenuhnya menerapkan dasar akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Adapun laporan keuangan yang disajikan berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Ayu Bagia Baha dalam penyajiannya dinilai belum mematuhi SAK ETAP, hal ini dikarenakan ada beberapa laporan keuangan yang tidak disajikan secara komparatif atau terpisah, sehingga informasinya tidak diungkapkan secara akurat.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti pada laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia, laporan posisi keuangan telah menyajikan aktiva berupa aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban, dan ekuitas. Namun, format dan urutan pos tidak ditentukan oleh SAK ETAP. Laporan posisi keuangan dapat dikatakan seimbang apabila aset jumlahnya sama dengan jumlah utang ditambah modal ( $\text{harta} = \text{utang} + \text{modal}$ ). Penyajian laporan laba rugi pada BUMDes Ayu Bagia juga telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP karena telah menyajikan laporan berupa pendapatan, beban, laba bruto, beban pajak, dan laba neto.

Hasil analisis laporan perubahan modal yang disajikan oleh BUMDes Ayu Bagia menunjukkan bahwa laporan tersebut belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini karena hanya menyajikan modal awal, kewajiban, dan deviden. Adapun akun tambahan modal, prive, dan SHU tidak disajikan dalam laporan perubahan modal BUMDes pada periode 2023. Penyajian laporan arus kas yang disajikan oleh BUMDes Ayu Bagia juga belum sesuai dengan SAK ETAP karena hanya menyajikan pos arus kas dari aktivitas operasi, sedangkan pos yang juga harus disajikan berdasarkan SAK ETAP berupa arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan tidak disajikan.

Catatan atas laporan keuangan yang telah kami analisis tidak sepenuhnya memuat informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan laporan keuangan. Meski BUMDes Ayu Bagia telah mengungkapkan CaLK, namun belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP sebagai

pedoman dalam menyajikan laporan keuangannya karena tidak menyajikan informasi tentang persediaan, hutang, ekuitas, dan pajak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengurus BUMDes Ayu Bagia belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan. Yaitu pengurus BUMDes kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pengimplementasian SAK ETAP yang berlaku. Kemudian pengurus BUMDes Ayu Bagia kurang menyadari akan pentingnya menyajikan laporan keuangan yang benar dan tepat berdasarkan SAK ETAP. Selain itu terdapat pula kurangnya komunikasi yang diperlukan dari pemerintah daerah mengenai penyampaian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Temuan bahwa adanya hambatan karena kurangnya pemahaman dan pelatihan pengurus BUMDes Ayu Bagia ini relevan dengan teori entitas yang menuntut tanggung jawab pengurus untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan informasi keuangan yang akurat, yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan teori entitas BUMDes Ayu Bagia sebagai entitas mandiri memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Sehingga penting bagi BUMDes Ayu Bagia untuk peningkatan pemahaman pengurus BUMDes agar dapat memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi entitas secara akurat, demi memenuhi kebutuhan eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al., (2022) dimana menyatakan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi dan kurangnya pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hasil ini sesuai dengan teori motivasi yang menjelaskan bahwa pemahaman pengelola BUMDes Ayu Bagia dalam menerapkan SAK ETAP meningkat seiring dengan tingginya motivasi untuk mempelajari ilmu akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman ilmu akuntansi yang dimiliki oleh pengurus BUMDes Ayu Bagia, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menggunakan informasi akuntansi dalam praktik usaha BUMDes Ayu Bagia, Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan, penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Ayu Bagia tahun 2023 meliputi penyajian Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, dan CaLK. Laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes belum sepenuhnya menerapkan ketentuan SAK ETAP dan masih terdapat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi ini mencakup kekurangan dalam laporan keuangan yang tidak diungkapkan secara komparatif dengan laporan keuangan 2022 atau terpisah dan ada beberapa laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan pos yang berdasarkan pedoman SAK ETAP. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kesadaran pengelola akan pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar.

## Saran

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pengelola BUMDes Ayu Bagia terhadap SAK ETAP mempengaruhi kualitas laporan keuangan BUMDes. Sebaiknya pengurus BUMDes mengikuti pelatihan terkait SAK ETAP agar dapat memahami dan menerapkan pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan BUMDes. BUMDes Ayu Bagia juga dapat memakai bantuan ahli akuntansi dalam menyusun laporan keuangan agar lebih akurat dan sesuai standar. Kemudian pemerintah daerah sebaiknya melakukan sosialisasi dan pelatihan akuntansi untuk pengurus BUMDes, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau pelaporan keuangan BUMDes.

## Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian hanya menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan BUMDes Ayu Bagia periode 2022-2023. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara ataupun data primer lainnya. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini mungkin tidak dapat menunjukkan kondisi keuangan dan praktik akuntansi BUMDes Ayu Bagia secara keseluruhan. Terutama jika ada perubahan kebijakan atau praktik setelah periode tersebut. Tempat penelitian juga terbatas pada BUMDes Ayu Bagia di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sehingga hasil analisis tidak dapat digunakan untuk generalisasi semua BUMDes di Indonesia, mengingat perbedaan konteks geografis, sosial, dan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafah Arifin, S., Inapty, B., & Dwi Astuti, B. R. (2022). Analisis Implementasi Sak Etap Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 498–505. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.262>
- Ayuningbudi, S. D., Solikah, M., & Winarko, S. P. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sempu Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 63–70.
- Ginanjar, Y., Hernita, N., Riyadi, W., & Rahmayani, M. Y. (2020). Factor Affecting The Quality. *Internatioal Conference on Climate Smart Sustainable Agriculture*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/466/1/012009>
- Harefa, L., & Serniati. (2023). Implementation of SAK ETAP in Cooperatives for Financial Report Presentation (Case Study of Tokosa Sahabat Sejati Consumer Cooperative in Gunungsitoli. *Jurnal EMBA*, 11(4), 249–260.
- Helmawanti, N., Yusri, Y., Rezeki, Y., & Yanti, S. (2023). Analisis Implementasi SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BUMDes Batu Batuah Desa Batu Tojah Kecamatan Barito Tuhup Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 629–639. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.2922>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 3 1,2,3. 10(11), 139–148.
- Indah Sari Sinaga, D., Nurlaila, N., & Daim Harahap, R. (2022). Analisis Penerapan Sak Etap Pada Bumdesa Yang Ada Di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 97–118. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.16>
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i2.1899>
- Munawir, Z., Riyanto, R., & Utama, A. M. (2022). Sosialisasi Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jatikesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *Japdi Kontribusi*, 02(01), 21–24. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/33%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/33/28>

- Poeh, M. M., & Peilouw, C. T. (2022). *Implementation Analysis of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) on Financial Statements of Bumdes Ora Et Labora in Usapisonbai Village, Nekamese District*. 647, 332–337.
- Rodriguez-galindo, R., Yasnó, C., & Espinoza-vá, G. (2024). *Enhancing financial transparency in non-profit organisations : Challenges and integration of IFRS for SMEs , IFR4NPO , and GRI standards*. 8(11), 1–21.
- Sirait, A. A. U., Sopanah, A., & Nurhayati, I. D. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada Penyajian Laporan Keuangan BUM Desa. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 3, 157–172. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art14>
- Supeno, A. (2023). Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Pada BUMDes Di Desa Tuban). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(4), 2986–4399. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i4.1258>
- Tampubolon, M. (2023). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 3(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Wahyudi, B., Palupi, D., Faculty, E., & Faculty, E. (2023). *Implementation Of SAK ETAP Chapter 11 Concerning Calculation Of*. 2(2), 30–36.